

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2012-2017**

**Elvia Puspa Dewi<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi STIE International Golden Institute - Jakarta  
Email : Elviapuspa3@gmail.com

**ABSTRAKS**

Belanja modal di suatu daerah umumnya dipengaruhi beberapa komponen seperti pendapatan asli daerah (PAD), besaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ketiga komponen tersebut PAD, DAU dan DAK di Propinsi Sumatera Barat pada interval tahun 2012-2017. Sampel riset ini sejumlah 19 kabupaten/kota seluruh Provinsi Sumatera Barat. Riset menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian tersebut. Data yang diakses merupakan data resmi keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dengan uji statistik linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Kesimpulannya adalah PAD, DAU dan DAK positif secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya kian tinggi variabel PAD, DAU dan DAK maka alokasi Belanja Modal juga semakin tinggi.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal.

**ABSTRACT**

*The capital expenditure in a region is generally influenced by several components such as regional ASI (PAD) revenue, the amount of general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK). The purpose of this study was to determine the effect of the three components of PAD, DAU and DAK in West Sumatra Province at intervals in 2012-2017. This research sample was 19 regencies / cities throughout West Sumatra Province. The research uses secondary data sourced from the Realization and Revenue and Expenditure Report (APBD) of the Regency / City which is the sample of the research. The data accessed is the official data from the Central Statistics Agency (BPS) of West Sumatra Province. Data analysis with multiple linear statistical tests.*

*The results showed: (1) Local Revenue has a positive effect on Capital Expenditures, (2) General Allocation Funds have a positive effect on Capital Expenditures (3) Special Allocation Funds have a positive effect on Capital Expenditures. The conclusion is that PAD, DAU and*

*DAK positively influence simultaneously on capital expenditure. This means that the higher the PAD, DAU and DAK variables, the higher the Capital Expenditure allocation.*

**Keywords:** *Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Capital Expenditures.*

## PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah dalam Indonesia kontemporer merupakan keniscayaan. Ada pergeseran kewenangan dalam hal tertentu dari konsep sentralistik menuju konsep pengelolaan pemerintahan desentralistik. Melalui model kebijakan ini, diharapkan mampu mengakselerasi proses atau implementasi pembangunan pada level daerah, memberi dimensi yang cukup pada bidang politik, manajemen dana daerah dan efisiensi penggunaan potensi dan kekayaan daerah untuk basis kepentingan rakyat daerah. Resultan yang muncul adalah bentuk dan rumusan pola pembangunan daerah yang sangkil, mangkus dan tentu saja terdesentralisasi.

Implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan pemerintahan dan otonomi daerah berimbang pada perubahan esensial pada fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Harapannya adalah meningkatnya aspek kualitas pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat daerah khususnya. Derajat keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bertalian pada komponen lain, seperti kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya insani lokal, serta kemampuan daerah mengembangkan kekuatan lokal, potensi – potensi yang laten pada kawasan daerah otonom tersebut.

Dalam rangka meninggikan kualitas layanan publik, pemerintah lokal/daerah wajib mengalokasikan dana. Bentuknya adalah skim Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beriringan dengan implementasi kebijakan otda terjadi pergeseran pada akses dan sumber pendapatan daerah, terutama ketika diikutkannya komponen dana perimbangan dalam postur APBD. Dalam konteks otda tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan pemda untuk pembiayaan berbagai kebutuhan. Termasuk dalam hal ini adalah Belanja Modal yang dilakukan oleh pemda dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik. Maka itu fungsi dan peran PAD, DAU, dan DAK sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pemda perlu atur belanja daerah dan mencermati Belanja Modal demi pembangunan dan pelayanan yang bermutu pada masyarakat luas. Untuk itu, pemda wajib kiranya mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan daerah, dimana dalam konteks ini adalah PAD, DAU, dan DAK. Andai suatu daerah terjadi peningkatan dimensi PAD, DAU, dan DAK secara simultan maka diharapkan berpengaruh pada peningkatan besaran Belanja Modal. Riset lampau soal Belanja Modal misalnya dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), yang mendapati bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pula bahwa DAU yang berpengaruh positif dan signifikan atas Belanja Modal.

Riset lain terdahulu karya Santosa dan Rofiq (2013) menampilkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, DAK tidak berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Modal suatu daerah. Riset lain lagi karya Oktora dan Pontoh (2013) melihat justru PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan besaran DAU dan DAK terlihat berpengaruh positif terhadap Belanja Modal suatu wilayah. Penelitian oleh Setiyani (2009) menampilkan hasil bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal suatu pemerintahan daerah. Sumarmi (2009) mendapati hasil riset bila PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Rujukan riset lain yang dilakukan Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) menyuguhkan hasil jika PAD, DAK dan DAU di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur berpengaruh terhadap Belanja Modal wilayah itu. Tampak bahwa riset – riset itu menampilkan hasil yang inkonsisten. Peneliti dalam konteks ini ingin menguji kembali, dengan riset ulang pengaruh PAD, DAK dan DAU terhadap Belanja Modal namun untuk provinsi yang berbeda yakni provinsi Sumatera Barat.

Dalam riset ini, rumusan masalah yang diajukan adalah : (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal? (2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal? (3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal? (4) Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat ?

Selanjutnya, tujuan riset ini adalah menguji (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. (3) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. (4) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Konsep PAD, DAU Dan DAK

Terminologi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah setempat dari sektor pajak daerah yang dibayarkan, retribusi daerah, hasil keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan aneka kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo; 2002). Herlina Rahman (2005) berargumen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dimiliki daerah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian konsep PAD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD. PAD merupakan perkiraan yang terukur menurut nalar alias rasional dan memiliki derajat kepastian serta dasar hukum kuat dalam hal penerimaannya.

Sementara itu Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan untuk kerataan pendanaan antar daerah di Indoensia. DAU digunakan untuk mendanai proyek - proyek daerah dalam implementasi desentralisasi. DAU disebar untuk provinsi dan kabupaten/kota. (Nordiawan, 2012). Dana Alokasi Umum berbasis prosentase tertentu dari GNP yang dituangkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum ditetapkan berbasis acuan tertentu yang berpedoman pada kerataan dan keadilan. Hal itu diselaraskan dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pemerintahan. (Renyowijoyo, 2010) Menurut aturan, Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto), dengan besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun berbeda, menurut keputusan yang diambil pemerintah. Juga setiap Provinsi/Kabupaten/Kota berhak atas DAU dengan jumlah angrgan yang berbeda. Namun setiap daerah dimungkinkan memperoleh DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah DAU pada tahun sebelumnya. Bahkan daerah yang berkapasitas Fiskal besar bisa saja tidak mendapat DAU atau DAU 0.

Dana Alokasi Khusus diambil dari APBN untuk wilayah tertentu dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek desentralisasi untuk: (1). Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (2). Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Renyowijoyo, 2010). Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari penerimaan APBN didistribusikan pada daerah tertentu. Gunanya adalah menopang dana kegiatan khusus yang menjadi beban daerah dan merupakan bagian dari program prioritas pada skala nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Dan, program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Renja Pemerintahan tahun anggaran bersangkutan. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN (Nordiawan, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan.

## **B. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah belanja pemda yang tingkat manfaatnya melebihi dari satu tahun anggaran. Belanja modal akan meningkatkan aset atau harta kekayaan daerah dan pada gilirannya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim; 2004). Belanja Modal hakikatnya sebagai pengeluaran untuk pembentukan modal, namun yang sifatnya menambah investasi yang berdayaguna lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa interval manfaat dan juga menambah kapasitas dan/atau kualitas aset.

Dalam tata kelola dana, peruntukan Belanja Modal ini berdasar kebutuha lokal daerah. Kebutuhan itu menyangkut sarana dan prasarana, baik menunjang tugas pemerintahan maupun bentuk fisik dari fasilitas publik. Pada umumnya setiap tahun diadakan proyek pengadaan aset tetap oleh pemda, sesuai skala prioritas anggaran dan pelayanan masyarakat. Belanja Modal

sebagaimana pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimanfaatkan pada pengadaan aset tetap berwujud. Aset tetap itu adalah aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan secara maksimal dalam kegiatan / aktivitas pemerintahan.

Merujuk pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, nilai aset tetap berwujud yang di anggarkan pada Belanja Modal, adalah senilai harga beli/bangun aset yang ditambah belanja terkait pengadaan/pembangunan asset, yakni sampai asset-aset tersebut siap untuk digunakan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dikatakan Kepala Daerah menetapkan derajat minimal kapitalisasi sebagai acuan dasar pembebanan Belanja Modal. Peraturan itu kongruen dengan PP 24 tahun 2004 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dan khususnya adalah PSAP no 7 mengenai akuntansi aset tetap.

## METODOLOGI PENELITIAN

Model riset ini adalah penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam riset ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu variabel terikat (*dependent variable*) adalah Belanja Modal.

### A. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan tentatif atau dugaan termungkin yang masih harus ditelusur kebenarannya. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan telaah teori diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1** : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- Ha1** : Terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
- H2** : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
- Ha2** : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
- H3** : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
- Ha3** : Terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
- H4** : Terdapat pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.
- Ha4** : Terdapat pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

### B. Populasi, Sampel dan Jenis Data

Populasi riset ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah sampel 19 kabupaten (n=19), diambil pada interval tahun 2012 – 2016, dengan menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Dari situ didapatkan 95 data, yang diserap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Provinsi Sumatera Barat, sebagai data skunder.

### C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam riset ini data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Data yang terdokumentasi itu dikaji, ditelaah sebagai sebuah sumber informasi yang faktual. Adapun teknik analisis data menggunakan beberapa pengujian, yang akan dideskripsikan sebagai berikut :

#### C.1 Pengujian Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas menelusuri apakah variabel dependen dan independen riset ini mempunyai distribusi normal atau tidak. Sebab distribusi normal adalah dasar dari statistik inferen dan model regresi yang baik. Adapaun model itu harus memiliki distribusi data normal atau sekurangnya mendekati normal. Uji deteksi normalitas data dapat via analisis grafik dan uji secara statistik. Analisis via grafik ditelusur dengan plot grafik histogram dan *normal probability plot*. Uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov*, pedoman disain keputusan yaitu apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal. Namun bila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi adalah data normal.

##### Uji Multikolinearitas

Uji ini diitempuh guna menentukan apakah di dalam model regresi ada korelasi kuat antar variabel independen. Model regresi normal tidak akan terjadi korelasi antar perubah independen itu. Hadir atau tidaknya multikolinieritas ditilik dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance value*  $> 0,01$  dan  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006).

##### Uji Autokorelasi

Uji ini mendeteksi apakah dalam model regresi, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Alat analisisnya adalah uji *Durbin-Watson*, yakni dengan melihat tabel *Durbin-Watson* (Santoso, 2001) sebagai berikut: (1) Angka D-W di bawah  $-2$  berarti terdapat autokorelasi positif (2) Angka D-W diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi (3) Angka D-W di atas  $+2$  berarti terdapat autokorelasi negatif.

##### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini akan melihat apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Caranya dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-PRED dengan residual S-RESID, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah  $(Y \text{ yang diprediksi} - Y \text{ sesungguhnya})$ . Andai titik tersebar acak dan tidak mempola, maka tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak guna.. Model regresi yang baik bersifat homokedastisitas Ghozali, 2006).

##### Analisis Regresi Berganda

Uji hipotesis riset ini ditempuh menggunakan uji regresi linear berganda. Jadi data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis data regresi linier berganda (Adek & Rahayu, 2019). Dalam riset ini regresi linier berganda akan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM). Formulanya sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

## C.2 Pengujian Hipotesis

### Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi R<sup>2</sup> akan menguji model regresi mampu menjelaskan variabel dependen dengan memiliki nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) antara nol (0) dan satu (1). Semakin besar R<sup>2</sup> atau hampir 1, maka variabel independen sanggup menjelaskan adanya pengaruh untuk mendeteksi koefisien variabel dependen. Sebaliknya jika kecil nilai R<sup>2</sup> maka variabel ini tidak mampu mendeskripsikan hubungan variabel dependen.

### Pengujian Kesesuaian Model (*Goodness Of Fit*)

Model uji F ini akan mengetahui apakah variabel bebas sesuai sebagai variabel penjelas terhadap variabel terikat. Keputusannya adalah (1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.

### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t mendeteksi apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel bebas, dengan kriteria keputusan (1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data Penelitian

Objek riset ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Provinsi di bagian Tengah pesisir Barat Sumatera. Provinsi ini berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 berdasarkan UU No. 61 Tahun 1958. Beribukota di kota Padang, yang terdiri dari 19 kabupaten/kota. Adapun Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat, terlihat pada tabel , berikut :

**Tabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal (BM)  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 -2017 (Dalam Rp.)**

No/ Th	Kabupaten/kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
<b>2012</b>					
1	Kabupaten Kep. Mentawai	37,025,685	371,174,681	26,688,300	154,692,193
2	Kabupaten Pesisir Selatan	40,254,884	689,139,244	70,443,330	129,353,610
3	Kabupaten Solok	26,679,467	521,759,479	54,762,570	134,972,369
4	Kabupaten Sijunjung	38,813,101	389,425,714	42,992,150	102,256,549
5	Kabupaten Tanah Datar	53,691,048	520,092,334	47,980,030	86,485,201
6	Kabupaten Padang Pariaman	31,287,083	588,234,576	63,917,200	132,295,639
7	Kabupaten Agam	41,572,966	595,713,049	74,202,750	87,359,625
8	Kabupaten Lima Puluh Koto	24,936,553	550,759,741	44,415,300	112,620,662

9	Kabupaten Pasaman	33,037,268	426,264,647	43,939,030	109,226,845
10	Kabupaten Solok Selatan	22,054,661	315,024,093	34,030,910	145,773,141
11	Kabupaten Dharmasraya	39,200,744	351,295,616	36,555,460	145,502,095
12	Kabupaten Pasaman Barat	32,493,954	457,694,684	52,908,300	150,888,242
13	Kota Padang	189,450,840	871,875,666	64,122,760	219,990,524
14	Kota Solok	23,320,507	280,495,629	23,908,660	104,394,127
15	Kota Sawahlunto	37,295,616	268,961,519	20,236,910	67,756,760
16	Kota Padangpanjang	32,420,607	269,610,492	18,629,610	47,129,849
17	Kota Bukittinggi	45,076,553	326,224,306	15,432,953	50,734,634
18	Kota Payakumbuh	50,708,915	325,023,247	25,559,910	66,385,767
19	Kota Pariaman	17,578,732	299,255,003	27,022,440	80,614,089
<b>2013</b>					
1	Kabupaten Kep. Mentawai	31,302,499	465,535,454	77,927,520	245,571,478
2	Kabupaten Pesisir Selatan	47,703,257	689,380,494	86,922,400	167,901,834
3	Kabupaten Solok	31,491,005	588,040,074	71,510,280	144,289,579
4	Kabupaten Sijunjung	38,098,006	448,681,128	68,769,170	159,054,412
5	Kabupaten Tanah Datar	63,835,094	587,104,249	53,771,930	128,063,359
6	Kabupaten Padang Pariaman	42,619,950	633,453,395	97,024,360	153,471,143
7	Kabupaten Agam	49,954,057	676,516,360	66,037,810	162,504,027
8	Kabupaten Lima Puluh Koto	33,095,121	632,930,786	41,291,780	163,994,894
9	Kabupaten Pasaman	46,023,666	481,180,159	51,502,690	149,872,058
10	Kabupaten Solok Selatan	22,222,385	351,505,736	41,291,780	165,589,773
11	Kabupaten Dharmasraya	33,711,644	400,374,128	46,474,958	157,124,312
12	Kabupaten Pasaman Barat	36,826,531	523,534,850	54,561,700	153,342,775
13	Kota Padang	238,871,897	1,003,116,093	81,841,800	289,610,361
14	Kota Solok	24,140,145	318,606,999	25,424,230	88,837,904
15	Kota Sawahlunto	37,104,574	396,397,490	30,307,130	68,692,918
16	Kota Padangpanjang	166,053,953	1,211,386,196	68,197,980	272,862,875
17	Kota Bukittinggi	56,203,592	368,311,195	22,360,545	76,293,325
18	Kota Payakumbuh	54,177,948	369,115,746	34,950,630	77,987,938
19	Kota Pariaman	20,639,405	60,965,911	33,771,130	131,623,978
<b>2014</b>					
1	Kabupaten Kep. Mentawai	39,384,048	531,389,939	103,381,020	255,389,680
2	Kabupaten Pesisir Selatan	50,012,299	753,984,939	107,565,620	184,282,996

3	Kabupaten Solok	32,757,228	651,730,691	90,839,880	164,943,655
4	Kabupaten Sijunjung	44,136,758	498,591,202	73,027,260	159,498,102
5	Kabupaten Tanah Datar	62,198,189	650,563,368	60,905,780	125,049,751
6	Kabupaten Padang Pariaman	56,520,310	683,756,765	108,209,250	197,972,821
7	Kabupaten Agam	60,156,323	739,359,873	73,233,820	159,343,818
8	Kabupaten Lima Puluh Koto	45,861,390	700,183,206	59,929,540	202,705,599
9	Kabupaten Pasaman	40,303,017	542,067,878	50,669,030	165,195,460
10	Kabupaten Solok Selatan	39,493,847	406,540,345	72,464,280	208,365,207
11	Kabupaten Dharmasraya	56,894,096	450,393,254	70,880,630	203,262,473
12	Kabupaten Pasaman Barat	51,054,256	580,406,954	78,952,230	200,298,285
13	Kota Padang	315,065,010	1,060,917,648	76,349,870	413,788,656
14	Kota Solok	25,370,393	354,372,862	32,287,100	100,215,622
15	Kota Sawahlunto	43,672,003	336,999,766	31,072,890	105,513,233
16	Kota Padangpanjang	39,156,750	341,743,150	31,839,720	129,295,169
17	Kota Bukittinggi	57,854,356	404,285,567	33,148,850	98,347,969
18	Kota Payakumbuh	60,965,911	412,929,814	32,503,170	119,825,514
19	Kota Pariaman	18,853,798	386,256,228	38,438,430	141,852,602
<b>2015</b>					
1	Kabupaten Kep. Mentawai	42,784,854	546,798,618	106,007,765	251,482,269
2	Kabupaten Pesisir Selatan	107,992,020	784,825,492	124,757,160	277,118,287
3	Kabupaten Solok	55,610,733	676,074,363	108,682,800	179,309,290
4	Kabupaten Sijunjung	65,008,435	516,685,152	83,012,850	167,695,075
5	Kabupaten Tanah Datar	112,072,727	667,139,623	84,999,100	137,034,861
6	Kabupaten Padang Pariaman	72,995,949	724,226,441	129,270,130	210,056,212
7	Kabupaten Agam	90,197,210	767,750,679	104,313,130	161,073,311
8	Kabupaten Lima Puluh Koto	62,932,393	725,615,816	80,257,430	174,180,411
9	Kabupaten Pasaman	79,684,486	562,775,575	70,659,300	176,591,156
10	Kabupaten Solok Selatan	38,533,385	433,585,911	114,638,880	215,458,902
11	Kabupaten Dharmasraya	56,694,339	477,807,496	102,807,090	264,546,590
12	Kabupaten Pasaman Barat	69,128,838	611,155,638	104,171,725	193,334,659
13	Kota Padang	370,413,732	1,072,429,395	50,026,350	287,580,511
14	Kota Solok	36,630,733	360,719,232	43,582,850	96,285,407
15	Kota Sawahlunto	52,268,500	353,133,144	49,434,430	135,443,679
16	Kota Padangpanjang	67,035,658	343,008,704	27,138,016	111,190,408

17	Kota Bukittinggi	66,027,358	408,640,651	28,676,544	69,174,912
18	Kota Payakumbuh	109,646,558	425,111,374	72,174,160	164,671,739
19	Kota Pariaman	29,897,289	389,745,497	49,605,640	170,191,189
<b>2016</b>					
1	Kabupaten Kep. Mentawai	41,948,183	597,919,262	161,803,838	277,846,773
2	Kabupaten Pesisir Selatan	118,915,304	853,086,114	266,889,269	283,996,333
3	Kabupaten Solok	58,803,478	723,675,568	229,110,956	205,316,599
4	Kabupaten Sijunjung	76,833,967	558,382,085	150,333,492	243,956,926
5	Kabupaten Tanah Datar	118,971,143	707,992,904	239,824,454	186,784,872
6	Kabupaten Padang Pariaman	72,859,395	783,592,205	332,332,844	306,540,213
7	Kabupaten Agam	102,597,442	828,020,573	259,204,726	192,813,122
8	Kabupaten Lima Puluh Koto	68,060,267	760,431,504	230,005,152	252,966,503
9	Kabupaten Pasaman	88,862,263	606,741,992	149,425,407	234,016,498
10	Kabupaten Solok Selatan	51,138,126	488,996,271	110,276,258	234,219,029
11	Kabupaten Dharmasraya	56,453,463	210,035,495	77,945,667	265,428,155
12	Kabupaten Pasaman Barat	91,174,718	655,854,990	185,632,197	267,700,819
13	Kota Padang	392,315,688	1,120,046,168	252,340,530	408,310,077
14	Kota Solok	42,117,207	405,224,758	90,881,309	136,028,385
15	Kota Sawahlunto	53,399,736	381,838,808	115,229,451	132,832,856
16	Kota Padangpanjang	70,357,124	382,149,494	68,629,780	146,899,922
17	Kota Bukittinggi	71,203,423	458,968,482	73,733,088	80,926,569
18	Kota Payakumbuh	87,445,115	445,523,347	138,894,264	161,516,311
19	Kota Pariaman	29,692,041	422,666,213	96,738,397	178,374,782
<b>2017</b>					
1	Kabupaten Kep. Mentawai	41,948	597,919	161,804	277,847
2	Kabupaten Pesisir Selatan	118,915	853,086	266,889	283,996

3	Kabupaten Solok	58,803	723,676	229,111	205,317
4	Kabupaten Sijunjung	76,834	558,382	150,334	243,957
5	Kabupaten Tanah Datar	118,971	707,993	239,824	187,785
6	Kabupaten Padang Pariaman	72,859	783,592	332,333	306,540
7	Kabupaten Agam	102,597	828,021	259,205	192,813
8	Kabupaten Lima Puluh Koto	68,060	760,432	230,005	252,967
9	Kabupaten Pasaman	88,862	606,742	149,425	234,016
10	Kabupaten Solok Selatan	51,138	488,996	110,276	234,219
11	Kabupaten Dharmasraya	56,453	507,913	210,035	265,428
12	Kabupaten Pasaman Barat	91,175	655,855	185,632	267,701
13	Kota Padang	392,316	1,120,046	252,341	408,310
14	Kota Solok	42,117	405,225	90,881	136,028
15	Kota Sawahlunto	53,400	381,839	115,229	132,833
16	Kota Padangpanjang	70,357	382,149	68,630	146,900
17	Kota Bukittinggi	71,203	458,968	73,733	80,927
18	Kota Payakumbuh	87,445	445,523	138,894	161,516
19	Kota Pariaman	29,692	422,666	96,738	178,375

Sumber Data : Statistik keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten – BPS

## B. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji *Kolmogorov-Smirnov*, pedoman yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal dan jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal. Hasilnya adalah :

**Tabel Hasil Uji Normalitas**

	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
N	114	114	114	114
Normal Parameters <sup>a,b</sup> Mean	85,346.63	553,495.64	95,622.91	178,566.88

Std. Deviation	114,844.504	203,381.514	69,098.360	75,094.507
Most Extreme Differences Absolute	.278	.091	.164	.100
Positive	.260	.091	.164	.100
Negative	-.278	-.077	-.124	-.050
Test Statistic	.278	.091	.164	.100
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 <sup>c</sup>	.021 <sup>c</sup>	.000 <sup>c</sup>	.007 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan variabel nilai signifikansinya  $\alpha > 0,05$  maka data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai Tolerance semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF dari semua variabel bebas lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	.774	1.292
Dana Alokasi Umum	.599	1.669
Dana Alokasi Khusus	.661	1.514

Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2019

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji *Durbin-Watson* (DW) diperoleh nilai sebesar 1,552 sehingga dapat disimpulkan bahwa data uji *Durbin-Watson* yaitu sebesar 1,552 terletak diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi di antara keempat variabel independen tersebut.

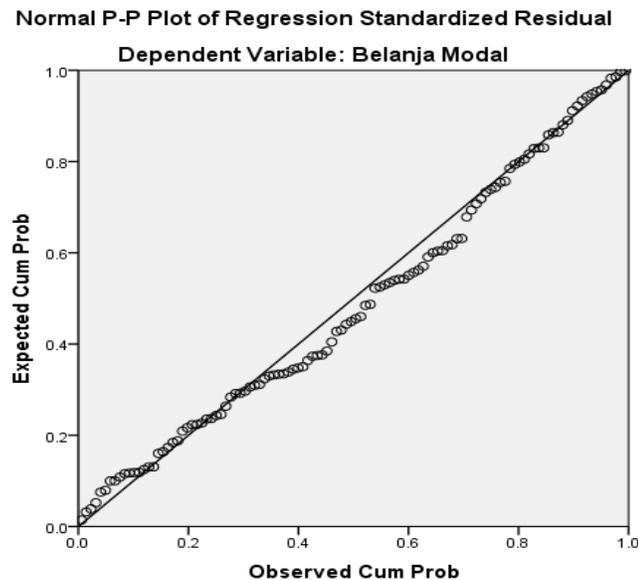
Tabel Hasil Uji *Durbin-Watson*

Model	Change Statistics	
	Durbin-Watson	
1	1.697	

Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2019

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan garfik *scatterplot* terlihat semua titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y serta tidak menunjukkan pola yang jelas, sehinga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2018.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi menilai seberapa besar pengaruh faktor dalam model penelitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Dalam riset ini hasilnya adalah:

**Tabel Hasil Analisis Model Regresi Linier Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45393.955	12423.062		3.654	.000
Pendapatan Asli Daerah	.128	.042	.197	3.090	.003
Dana Alokasi Umum	.148	.027	.400	5.537	.000
Dana Alokasi Khusus	.423	.075	.389	5.650	.000

a= Dependent Variable: Belanja Modal  
Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2019

Dari tabel diatas *part* yang diinterpretasi adalah nilai kolom B, baris pertama memperlihatkan konstanta ( $\alpha$ ) dan baris selanjutnya menunjukkan kostanta variabel independen. Dengan demikian dapat disusun persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$BM = 45393,955 + 0128 PAD + 0,148 DAU + 0,423 DAK + e$$

### C. Pengujian Hipotesis

#### Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil Uji R<sup>2</sup> atau uji determinasi menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi **R<sup>2</sup> = 0,656** mendekati satu, sehingga perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Adapun hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.810 <sup>a</sup>	.656	.646	44,658.442	.656

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2019

Menurut tabel nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0, 656 atau 66%. Artinya perubahan yang terjadi pada variabel Belanja Modal (BM) sebesar 66% mampu dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Kesesuaian Model**

Change Statistics

Model	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	69.837	3	110	.000

Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Anova atau uji kelayakan model pada tabel terlihat bahwa dengan  $df1 = 3$  dan  $df2 = 110$  nilai F sebesar 69.837 lebih besar dari  $F_{tabel} = 2,68$  dan nilai signifikan sebesar 0.000 ( $\alpha < 0,05$ ) atau 5%, maka H<sub>4</sub> ditolak dan H<sub>a4</sub> diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

#### Pengujian Hipotesis (Uji t)

Hasil Uji t dari pengaruh dari masing-masing variabel PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal dapat dilihat dari arah tanda dan tingkat signifikansi sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Analisis Uji Hipotesis t**

Model	t	Sig.	Kesimpulan T
1 (Constant)	3.654	.000	
Pendapatan Asli Daerah	3.090	.003	Berpengaruh
Dana Alokasi Umum	5.537	.000	Berpengaruh
Dana Alokasi Khusus	5.650	.000	Berpengaruh

a. Dependent Variable: BM , Sumber : Ouput SPSS 23 diolah tahun 2019

Dari tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah (X1), menunjukkan bahwa thitung 3,090 > ttabel 2,353 dan memiliki Sig. 0,003 < 0,05 yang berarti signifikan dan H1 ditolak dan Ha1 diterima (Ada pengaruh signifikan). Dana Alokasi Umum (X2), bahwa thitung 5,537 < ttabel 2,353 dan memiliki Sig. 0,000 < 0,05 yang berarti signifikan namun berarti H2 diterima dan Ha2 ditolak (tidak ada pengaruh), Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (X3), bahwa thitung 5.650 > ttabel 2,353 dan memiliki Sig. 0,00 < 0,05 yang berarti Signifikan dan H3 ditolak dan Ha3 diterima (ada pengaruh signifikan).

#### **D. Pembahasan**

##### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh positif yang berarti bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan ke Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Santosa dan Rofiq (2013), Nuarisa (2012) dan Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah mencerminkan kemandirian daerah, yang artinya daerah tersebut Pemerintah Daerah semakin tidak tergantung terhadap Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sumber-sumber yang diterima dalam wilayah daerah itu sendiri. Meskipun Pendapatan Asli Daerah jumlahnya sedikit tetapi Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh dalam alokasi yang digunakan dalam Belanja Modal maupun untuk membiayai kegiatan operasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah Daerah lebih memaksimalkan serta memanfaatkan sumber daya daerah yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh yang berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan ke daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Nuarisa (2012), Santosa dan Rofiq (2013), Oktora dan Pontoh (2013) dan Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dampaknya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain daripada itu, DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya harus diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum berkaitan dengan belanja modal, karena Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah fungsinya bertujuan untuk mendanai belanja pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini Dana Alokasi Khusus berpengaruh yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarmi (2009), Oktora dan Pontoh (2013) dan Isti Permatasari dan Titik Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu mendanai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus dipergunakan untuk menutupi ketidakseimbangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berkaitan dengan Belanja Modal.

## **SIMPULAN & SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal, peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Peneliti hanya menggunakan satu Provinsi saja, yaitu Sumatera Barat. Dengan menggunakan variabel yang sama, sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti Provinsi lain. Sehingga dapat membandingkan pengaruh dari variabel tersebut antara satu Provinsi dengan Provinsi lain. Sehingga hasil penelitian yang didapat memiliki cakupan yang lebih luas (2) Menambah jangkauan tahun penelitian (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen keuangan lain selain ketiga variabel independen dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adek, Ayu & Rahayu, Puji R, 2019. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan pada Unit Pembenihan Lele Mina Jaya Rasa Tahun 2018*, Jurnal Intelektiva , Edisi Vol 1 No 01, 2019
- Adi, P.H. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali). *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada kabupaten dan kota se Jawa – Bali). *Simposim Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanudin. Makasar.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Th. XIII/25.
- Harianto, D. dan H.A. Priyo. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta. . 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Nuarisa, S.A. 2012. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Oktora, F.E. dan W. Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal (Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Accountability*. Vol. 2 (1).
- Putro, N.S. dan S. Pamudji. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

- dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, BPFE UGM: 33-40*. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). Jakarta.
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126). Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang *Dana Perimbangan*. Jakarta.
- Santosa, A.B. dan M.A. Rofiq. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 2 (2).
- Santoso, S. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Secaran, U. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawan, A.W. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta periode 2007-2013. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setiyani, S.E. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2007. *Tesis*. Universitas Stikubank Semarang.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Sumarmi, S. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY, Vol 4*.
- Usman, S. dkk. 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Lembaga Penelitian SMERU-Jakarta.
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara). *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, A.G. 2012. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 (1).
- Yuwono, S., T.A. Indrajaya., Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing. Malang.

Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016 ISSN : 2460-0585